

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera

Cikal bakal PKS berasal dari gerakan dakwah para mahasiswa dan mahasiswi di kampus-kampus luar negeri maupun tanah air. Perjalanan dakwah para aktivis kampus dikenal sebutan gerakan tarbiyah di Indonesia, mulai marak sejak tahun 1990-an.<sup>1</sup>

Setelah sukses menjadi gerakan dakwah kampus dan di masyarakat, gerakan tarbiyah mulai mengenal jati dirinya dan mencoba mengundi nasib di kancan politik. Lahirlah Partai Keadilan (PK) pada 9 Agustus 1998 sebagai cikal bakal dari Partai Keadilan Sejahtera (berasimilasi jadi PKS pada 20 April 2002/9 Jumadil Ula 1423 Hijriyah)<sup>2</sup>.

Pendiri PKS kebanyakan memang dari kalangan anak muda aktifis masjid kampus, sehingga wajar bila dimasukkan ke dalam kotak modernis. Namun bila kita perhatikan lebih cermat, sejumlah pendiri PK jelas-jelas berakar dari kalangan tradisional. Seperti, Salim Segaf al Jufri tercatat masih cucu pendiri Al Khairat yang cukup dominan di wilayah Indonesia bagian Timur, KH Rahmat Syafi'i tergolong murid KH. Abdullah Syafi'i (pendiri Asy Syafi'iyah dari Jakarta), Ahmad Heriawan adalah kader Persatuan Umat

---

<sup>1</sup>Djony Edward, *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006), Cet. Pertama, hlm. xiii.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm xxii.

Islam (PUI), Daud Rasyid Sitorus berasal dari lingkungan Jamaah Al Washliyah di Sumatera Utara. Semuanya tercatat sebagai Dewan Pendiri PK.<sup>3</sup>

Terlihat sejumlah nama yang berakar tradisional kuat, seperti H.M. Nasir Zein (Betawi), Mohammad Idris Abdus Somad (Sunda), Ahzami Samiun Jazuli (Jawa), Iskan Lubis (Sumatera), dan lain-lain. Karena itulah PKS sulit dikategorikan sebagai partai tradisional atau modern.<sup>4</sup>

Pada tahun 1998 Partai Keadilan mendeklarasikan dirinya di mesjid Al Azhar Jakarta. Tahun 1999, pemilu pertama pasca reformasi, Partai Keadilan memperoleh suara 1,4 juta pemilih. DPR RI 7 kursi, DPRD Provinsi dan Kabupaten sebanyak 105 kursi, serta satu orang menteri di pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gusdur).<sup>5</sup>

Pada 21 Mei 2000, Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Presiden PKS - dalam Munas I PK di hotel Bumiwiwara, Depok - menggantikan Nurmahmudi Ismail yang menjadi Menteri Kehutanan. Namun langkah PK menyamai benih dakwah di laha politik terbentur ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum electoral treshold yang mengakibatkan PK tidak bisa ikut dalam Pemilu 2004.

Didorong kuatnya keinginan untuk ikut berkontribusi bagi negeri tercinta, 17 April 2003 Musyawarah Majelis Syuro XII Partai Keadilan

---

<sup>3</sup> Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah*, ( Harakatuna Publising, Bandung 2005), hlm. 30.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>5</sup> Radar Banjarmasin, *Menyongsong 9 tahun Partai Keadilan Sejahtera, Mengokohkan Langkah, Memimpin dan Melayani*, April 2007.

merekomendasikan untuk bergabung dengan PKS. Tanggal 20 April 2003 dilakukan deklarasi Partai Keadilan Sejahtera di Silang Monas Jakarta, dihadiri 40.000 masa.

DPP PKS dinyatakan lulus verifikasi oleh Depkeham pada 4 Juni 2003, dan satu bulan kemudian PK resmi bergabung dengan PKS. Pemilu 2004 PKS mendapatkan 8,4 juta suara. Dengan terpilihnya DR Hidayat Nurwahid sebagai ketua MPR RI, maka posisi Presiden PKS digantikan oleh Ir. Tifatul Sembiring sebagai bentuk budaya reformis: pejabat publik jangan jadi pemimpin parpol.

Partai Keadilan Kalsel dideklarasikan pada tanggal 27 September 1998 di Taman Budaya Banjarmasin, dihadiri oleh Habib Aboe Bakar Al Habsyi selaku wakil sekjen DPP PK dan Zulfikar Ali Akbar, ketua Partai Keadilan Kalsel. Musyawarah DPW Partai Keadilan Kalsel, pada 28 Februari 1999 menghasilkan restrukturisasi kepeguruan Partai Keadilan Kalsel yang diketuai oleh Alwi Sahlan.<sup>6</sup>

PK Kalsel pun bersiap menghadapi Pemilu 1999 yang kemudian menghasilkan suara 18.200 dengan satu perolehan kursi di DPRD Propinsi Kalsel, dan 6 kursi di Kabupaten/Kota.

Atas dasar SK DPP PKS, pada tanggal 27 Agustus 2003 yang ditandatangani oleh ketua PKS Almuzammil Yusuf menandai bergabungnya Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera dengan strukturnya yang baru di Kalsel. Kepemimpinan PKS masih dipegang oleh Alwi Sahlan.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Pemilu 2004 PKS Kalsel memperoleh suara 1 kursi di DPR RI, 6 kursi DPRD Propinsi, dan 34 kursi di DPRD Kabupaten/Kota. Nampak nyata, PKS menoreh catatan sejarah tersendiri dengan lompatan prestasi dari perolehan suara yang hanya 18.200 menjadi 160.000 pada pemilu 2004. Lonjakan suara yang 879% adalah sejarah emas.

Pada Muswil I DPW PKS Kalsel memilih Riyadi sebagai ketua umum, menggantikan Alwi Sahlan yang terpilih sebagai wakil walikota Banjarmasin pada bulan April 2005.

Sekali lagi budaya politik modern diperlihatkan PKS, bahwa seorang wakil walikota yang pejabat publik, tidak perlu lagi menjadi pemimpin parpol. Kader partai yang menjadi birokrat sudah menjadi milik masyarakat. Selain itu, juga agar tidak terjadi konflik kepentingan.<sup>7</sup>

Pendirian Partai Keadilan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berawal dari keinginan para kader Partai Keadilan di Banjarmasin untuk memperlebar sayap dakwahnya melalui institusi partai. Pada Oktober 1998, terbentuklah Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan di bawah pimpinan Ardiansyah, S. Hut sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Ja'far S. Hut sebagai sekretaris.<sup>8</sup>

Untuk memenuhi persyaratan Pemilu 1999, Partai Keadilan Kabupaten Hulu Sungai Selatan membentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di masing-

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Wawancara pribadi penulis dengan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ja'far S.Hut. di ruangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kamis, 03 Desember 2009.

masing kecamatan. Perolehan suara Partai Keadilan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pemilu 1999 mencapai 1.700 suara, mendudukkan Ketua DPC PK Daha Utara KH. Muhammad Yusran sebagai anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pertama dari Partai Keadilan (PK) . KH. Muhammad Yusran wafat ketika baru menjabat selama tiga bulan, untuk menggantikan posisi tersebut dilantiklah Ardiansyah, S. Hut (peroleh suara terbanyak kedua di Partai Keadilan pada Pemilu 1999) sebagai Pejabat Antar Waktu (PAW) sampai berakhir masa jabatannya pada tahun 2004.<sup>9</sup>

Di awal berdirinya Partai Keadilan (PK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 1998, kantor sekretariat berada di sebuah rumah kontarakan sederhana di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan. Setelah Pemilu 1999 sekretariat pindah ke lokasi tidak jauh dari tempat semula. Setelah itu pindah ke Jalan Aluh Idut, kemudian ke Jalan Pahlawan dan terakhir di Jalan Al Falah, Rt. 3 Lk. I Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan hingga sekarang.<sup>10</sup>

Sebagai partai yang mengemban misi dakwah, ada ciri khas dari Partai Keadilan Sejahtera, yaitu silaturahmi dan minta nasihat dengan para ulama dan tokoh agama setempat. Salah satunya adalah almarhum KH. Abu Hurairah, Pandai Kandangan, yang banyak memberikan nasihat cara berpolitik yang baik dalam rangka ibadah kepada Allah Swt.

---

<sup>9</sup> Wawancara pribadi penulis dengan H. Ardiansyah, S.Hut, di ruangan Kantor Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin, 30 November 2009.

<sup>10</sup>Wawancara pribadi penulis dengan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ja'far S.Hut. Kamis, 3 Desember 2009.

Keberhasilan PKS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga tidak bisa dilepaskan dari peran seorang pengusaha muda H. Najamuddin (Haji Nanang) yang selalu memberikan dukungan, mulai dari Partai Keadilan (PK) sampai menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tampilan kader PK (sebelum menjadi PKS) Ardiansyah S.Hut sebagai anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sifat kesederhanaannya membawa keberhasilan PKS untuk menarik simpati rakyat pada Pemilu 2004.

Pemilu 2004 bisa dibilang puncak dari kejayaan PKS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena dari perolehan 1 kursi pada Pemilu 1999 menjadi 7 kursi pada Pemilu 2004. Bahkan dari 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan, PKS Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling banyak mendapatkan perolehan kursi dari 25 kursi di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **B. Strategi Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera**

### **a. Tiga Faktor Pendulang Suara**

#### **1. Faktor Kekerabatan dan Pertemanan**

Faktor kekerabatan dan pertemanan cukup signifikan dalam mempengaruhi pilihan politik masa. Setidaknya ada beberapa sebab. Pertama, ini metode penjaringan massa berbiaya murah. Kedua, tingkat keterukuran hasilnya lebih besar karena melibatkan hubungan personal yang telah lama dibangun. Ketiga, metode pendulangsura ini sangat tepat karena didukung citra PKS sangat positif. Keempat, medel

penjaringan massa seperti ini cocok dengan realita PKS sebagai partai kader.<sup>11</sup>

## 2. Faktor Pengaruh Tokoh Masyarakat

Di Pemilu 1999, pengaruh tokoh juga tampak di beberapa daerah pemilihan Partai Keadilan (PK), walupun belum besar. Saat ini betapa banyak tokoh masyarakat, bahkan tokoh partai lain, yang menyatakan ingin bergabung dengan PKS dengan alasan yang rata-rata sama, yakni terkesan dengan citra PKS; kader PKS santun ketika demonstrasi, terdepan membantu korban bencana alam, anggota dewan PKS yang bersih dari praktik KKN.

## 3. Faktor Citra Partai

Riset Nasional PKS mendapat data tentang pandangan pemilih terhadap citra PKS selama ini. Citra yang kuat ditangkap oleh massa pemilih adalah citra keislaman PKS. Citra selengkapnya adalah: partai Islamis, agamis, orang Muhammadiyah dan NU, pesantren, kiai, Masyumi, dakwah, jenggot, jilbaber, syariat Islam, baju putih, dan memperjuangkan syariat.

### b. Spiritualitas Politik

Jika politik dianggap wilayah yang kotor, maka berkecimpung di dalamnya akan berkonsekuensi mengotori spiritualitas (ruhiyah). Tapi, jika politik adalah medan dakwah, maka pada saat yang sama ia akan menjadi sarana tarbiyah, termasuk tarbiyah ruhiyah.

---

<sup>11</sup> Almuzammil Yusuf, *“Isu Besar Dakwah dalam Pemilu”*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2003), hlm. 53-56.

### 1. Keteladanan Anggota Legislatif

Anggota Legislatif telah tampil menjadi simbol kejujuran. Bahkan, sebagian mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk menentang penyimpangan (kasus suap pencalonan Bupati; pengungkapan sogokan DPR Propinsi; dan lain-lain).

Sebagian lagi terus memelihara kepekaan terhadap derita kemiskinan rakyat dan kesederhanaan para kader PKS. Sehingga setiap kali akan menikmati gajinya dan berbagai fasilitas dewan, yang terbayang adalah kemiskinan masyarakat dan para kader partai.

### 2. Keteladanan Fungsionaris dan Kader

Tim Lajnah Pemilu Pusat (LPP), ketika keliling ke daerah, telah menyaksikan fungsionaris dan para kader menghidupkan jihad maali (tabungan pemilu) di tengah berbagai kendala keuangan mereka. Mereka tetap menyumbang walaupun hanya recehan di sela-sela menyisihkan untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

### 3. Keteladanan Tokoh Umum dan Simpatisan

Seorang tokoh nasional menolak ajakan sebuah partai besa untuk bergabung dan menduduki posisi strategis. Ia lebih memilih menjadi kader PKS. Sekalipun dengan ini, ia tidak mendapatkan posisi apapun di PKS. Itu semua karena panggilan idealismenya. Padahal, tokoh-tokoh yang lain sibuk melakukan intrik untuk duduk di salah satu partai besar itu.



### c. Peran Anggota Legislatif

Menjadi anggota Dewan, adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Sebagai wujud pertanggungjawaban tersebut, anggota legislatif PKS harus memperlihatkan kerja mereka secara aktif dalam empat hal: (1) proses pembentukan kebijakan politik; (2) manuver komunikasi politik ke publik; (3) *up grading* ketokohan politik dan *maintenance* keteladanan politik; (4) fungsi rekrutmen massa.<sup>12</sup>

#### 1. Proses Pembentukan Kebijakan Politik

Ini adalah posisi strategis kerja politik. Karena kebijakan dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan akan keluar dari proses ini. Ia bisa merupakan proses atau kerja yang terbuka maupun tertutup. Orang yang kerja sungguh-sungguh atau yang tidak kerja tidak mesti diketahui publik. Namun hasil kerja mereka jelas akan mengikat publik. Dari sudut ini kerja anggota legislatif PKS secara umum telah melakukannya dengan baik.

#### 2. Manuver Komunikasi Politik Ke Publik

Jika yang pertama lebih merupakan wilayah dinamika internal dewan. Maka yang kedua ini lebih besar merupakan jembatan yang membuka hubungan antara internal, dengan hak publik untuk mengetahui dinamika yang terjadi. Dinamika yang akan ditangkap

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 71.

oleh publik, bisa merupakan dinamika sesungguhnya, namun bisa juga merupakan “panggung sandiwara”.

### 3. *Up Grading* Ketokohan Politik dan *Maintenance* Keteladanan Politik

Jika seorang anggota legislatif yang aktif memainkan dua peran di atas, maka akan terjadi proses percepatannya menjadi seorang tokoh politik yang diakui dewan dan publik sekaligus. Karena ia mampu memerankan peran legislator dan aktor sekaligus. Namun sesungguhnya ketokohan politik dalam jangka panjang, dibangun lebih luas dari sekedar dua syarat di atas.

Ia juga terkait dengan syarat moralitas dan integritas perjuangan yang konsisten dari waktu ke waktu. Dari sini akan memunculkan keteladanan figur politik. Hal yang terakhir tentu akan sangat strategis menjadi perhatian dan penilaian partai kader seperti PKS untuk meloloskan calengnya dikemudian hari.

Ia lebih dari sekedar bersih secara finansial (tidak mempan sogok); tapi juga kesederhanaan di tengah komunitas kader dan ummat yang memang mayoritas kekurangan; serta keberanian untuk menghadapi teror dan ancaman fisik (bahkan pembunuhan) di dalam menjalankan perannya.

### 4. Fungsi Rekrutmen Politik Massa

Inilah buah yang akan didapat setelah tiga hal di atas tadi terpenuhi. Yakni dalam konteks pertarungan pemilu, ia akan

memberikan manfaat rekrutmen dukungan politik massa kepada anggota legislatif tersebut maupun partai.

Dalam sistem distrik, anggota legislatif yang populer jelas akan mengambil manfaat yang besar dari ketokohnya. Karena pemilu akan memilih figur tokoh ketimbang partai. Dalam era pemilu langsung presiden, gubernur, bupati dan walikota, maka kebutuhan akan anggota legislatif seperti di atas jelas sesuatu yang niscaya.

#### d. Tokoh Eksternal

Konsekuensi logis dari meluasnya pesona PKS di panggung politik adalah bertambahnya ketertarikan publik dan sejumlah untuk bergabung.

Keberadaan para tokoh dapat memperkokoh kedudukan dan pengaruh politik partai. Juga dapat mempercepat realisasi visi, misi dan program partai.

Perlunya menjaring para tokoh untuk memperkuat partai bisa dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, partai adalah milik publik (*public property*). Ia bertujuan untuk meraih dukungan publik sebesar-besarnya. Konsekuensinya partai harus membangun citra keterbukaan yang seluas-luasnya.

Sebab, jika sebuah partai terekspose—atau dicitrakan lawan (*demarketing*)—sebagai partai tertutup, tentu akan sangat mengurangi kecendrungan para tokoh (dan juga massa) untuk bergabung dengannya.

*Kedua*, salah satu prinsip pergerakan Islam (baca: partai Islam) adalah optimalisasi potensi (*istiglalul amtsal*). Yakni, mampu memanfaatkan

berbagai potensi yang ada, terutama potensi SDM (sumber daya manusia), dalam rangka memenangkan pertarungan politik. Karakter pertarungan politik tidaklah sederhana, karena lawan kerap menggunakan prinsip Machiavelis (menghalalkan segala cara). Maka, hanya SDM unggul, handal dan tertata dengan baik yang dapat mengatasi persaingan itu.

*Ketiga*, partai dalam konteks pemilu dalam sistem demokrasi, adalah wadah perjuangan yang menang kalahnya lebih menonjol aspek kuantitatifnya. Dalam bahasa sederhananya, bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh isi kepala (kecerdasan, visi, dan lain-lain), melainkan ditentukan oleh jumlah kepala. Oleh karenanya dukungan para tokoh massa sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan perolehan suara partai, yang pada gilirannya akan meningkatkan perolehan kursi partai.<sup>13</sup>

### **C. Falsafah Dasar Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera dan Platform Kebijakan Pembangunan**

Falsafah dasar perjuangan PKS merupakan pemikiran mendasar (*Al-Fikru al-asasi*), berupa kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, yang meliputi akidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan manusia. Konsep ideologi yang aplikatif menjadi peta jalan (*road map*) menuju solusi bagi krisis multi dimensi yang sedang terjadi di Indonesia karena konsep ini akan

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 86.

diterjemahkan lebih lanjut ke dalam Konsep Konsolidasi politik (Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera) di berbagai bidang strategis, seperti ekonomi, hukum, pendidikan, pertahanan, pertanian, energi, pertambangan dan lain-lain. Format ideologi khas Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi rujukan dalam membangun kepemimpinan opini publik (*Opinion Leader*).<sup>14</sup>

Partai Keadilan Sejahtera sebagai entitas politik nasional, secara subyektif berjuang dengan dasar akidah, asas, dan moralitas Islam untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Bersama-sama dengan entitas politik lainnya secara kompetitif berjuang untuk mencapai cita-cita nasional. Islam secara eksternal adalah bentuk diferensiasi dan sekaligus *positioning* Partai Keadilan Sejahtera sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan entitas politik lainnya.

Di sisi lain dengan menjadikan Islam sebagai akidah, asas dan basis moral, maka Partai Keadilan Sejahtera berkeyakinan dan ingin menegaskan bahwa secara internal-subyektif aktivitas politik adalah “ibadah”, yang apabila bertujuan untuk kemaslahatan umat, didasarkan pada niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang

---

<sup>14</sup> Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani, edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera*. (Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2008), cet. I, hlm. viii.

baik dengan akhlak terpuji, maka aktivitas ini menjadi ibadah yang bernilai “amal shalih”.<sup>15</sup>

PKS menyusun dokumen Platform Kebijakan PKS untuk menjadi acuan dan pedoman bagi kader dakwah PKS dalam menjelaskan kepada publik dan konstituen mengenai visi dan misi, program, dan sikap partai terhadap persoalan bangsa.

Platform Kebijakan Pembangunan PKS merupakan dokumen yang merefleksikan visi, misi program dan sikap partai terhadap persoalan Indonesia. Platform menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan partai, dan akan menjadikan segenap aset partai di semua sektor kehidupan, yaitu sektor ketiga, sektor publik dan sektor swasta bekerja secara terintegrasi, kontinyu, fokus dan terarah sehingga sumber daya partai yang terbatas bisa dikelola secara baik untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dan secara langsung bisa dirasakan oleh para simpatisan, konstituen dan masyarakat pada umumnya.

Platform politik ini untuk menegaskan karakteristik PKS sebagai Partai Dakwah, yang bukan sekedar bekerja *staggle for power* secara struktural politik setiap 5 tahunan dalam bingkai Pemilu, tetapi juga sebuah partai yang menggulirkan kerja-kerja kultural dalam pembangunan umat dan peradaban. Dalam konteks inilah dapat diungkapkan tekad PKS sebagai sebuah institusi

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 33.

dakwah yang mengusung prinsip dan komitmen bersih, peduli, dan profesional.<sup>16</sup>

#### **D. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera**

Dalam Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, Partai Keadilan Sejahtera mempunyai tujuan dan kegiatan sebagai berikut :

##### Tujuan Dan Kegiatan

##### Pasal 5

Tujuan Partai yaitu:

1. Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2. Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah *Subhanahu Wa taala*, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Partai menjalankan kegiatan antara lain politik, dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial-kemasyarakatan, dan memberikan alternatif solusi terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara.

---

<sup>16</sup> Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani, edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera. Ibid*, hlm. xii-xiii.

## Pasal 7

Partai menggunakan berbagai sarana yang tidak bertentangan dengan norma hukum dan kemaslahatan umum antara lain:

- a. Aktivitas politik, pendidikan dan pelatihan, dakwah, hukum, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarakat serta dapat menyelesaikan persoalannya;
- b. Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintahan; badan-badan penentu kebijakan, hukum, dan perundang-undangan; lembaga swadaya masyarakat;
- c. Menerima dan menyerap aspirasi serta mengutamakan dialog konstruktif dan kerja nyata dengan semua unsur masyarakat.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, Partai Keadilan Sejahtera mempunyai sasaran, kegiatan dan sarana, sebagaimana tersebut di bawah ini:

### Sasaran, Kegiatan, dan Sarana

1. Untuk mencapai tujuan Partai, dirumuskan sasaran berikut:
  - a. Terwujudnya masyarakat yang mandiri, bermartabat, bertanggung jawab, peduli, sejahtera, dan bahagia di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>17</sup> Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madan, edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera*. *Ibid.* hlm. 590.



- b. Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, berwibawa, dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum, perundang-undangan serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Sasaran Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Kebijakan Dasar dan Rencana Strategis Partai.

### Pasal 3

Untuk mencapai tujuan Partai maka dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Menyampaikan dakwah dan tarbiyah Islamiyah kepada masyarakat, khususnya umat Islam, secara benar, jelas, utuh, dan menyeluruh;
- b. Mendorong kebajikan di berbagai bidang kehidupan;
- c. Memberantas kebodohan, kemiskinan, dan kerusakan moral;
- d. Menghimpun jiwa dan menyatukan hati manusia di bawah naungan prinsip-prinsip kebenaran;
- e. Mendekatkan berbagai persepsi antara madzhab-madzhab di kalangan Umat Islam;
- f. Memberi alternatif solusi terhadap berbagai persoalan umat dan bangsa serta pembangunannya;
- g. Membangun peradaban manusia atas dasar keseimbangan iman dan materi;
- h. Meningkatkan kesejahteraan Anggota Partai dan masyarakat;

- i. Merealisasikan keadilan dan solidaritas sosial serta ketentraman bagi masyarakat;
- j. Mengembangkan dan melindungi kekayaan Bangsa dan Negara;
- k. Memajukan perlindungan hak-hak asasi manusia;

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan sasaran dan kegiatan tersebut Partai menggunakan sarana-sarana, antara lain;

- a. Dakwah:
  - 1. Melalui media massa cetak, dan elektronik serta media komunikasi lainnya;
  - 2. Pengiriman delegasi di dalam dan ke luar negeri
  - 3. Melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga-lembaga strategis lainnya.
- b. Tarbiyah:
  - 1. Memantapkan prinsip-prinsip Islam bagi anggota Partai;
  - 2. Mengokohkan arti beragama yang sebenarnya pada setiap pribadi dan keluarga, baik dalam ucapan maupun perbuatan;
  - 3. Membina dengan cara yang benar sesuai dengan Alquran dan Assunnah dalam aqidah, ibadah, akhlak, muamalah, ruhiyah, aqliyah, dan jasmaniyah;
  - 4. Meneguhkan arti ukhuwah yang sebenarnya, saling melindungi secara utuh, saling menolong secara penuh, hingga tercipta solidaritas soisal;

5. Melahirkan generasi baru yang memahami dan melaksanakan Islam secara benar dan baik, serta berperan di berbagai sektor kehidupan;
6. Melakukan pembinaan kualitas Anggota baik dalam skala individu, keluarga maupun komunitas kerja dan profesi.

c. Konsep

1. Menyusun konsep pembinaan untuk mengarahkan semua bidang kehidupan masyarakat, antara lain pendidikan, hukum, sosial, seni, budaya, politik, ekonomi, manajemen, kesehatan, kewanitaan, keluarga, dan bela negara;
2. Mensosialisasikan konsep pembinaan kepada anggota dan konstituen.

d. Institusi

1. Mengoptimalkan institusi di lingkungan partai untuk kepentingan konstituen melalui pendidikan dan pelatihan politik, serta klub diskusi, olah raga, kesenian, dan kebudayaan;
2. Mengoptimalkan institusi lain untuk memberdayakan Anggota Partai dalam berbagai kegiatan, antara lain perbaikan hubungan antar individu dan keluarga, pemberantasan penyakit-penyakit sosial, bimbingan dan penyuluhan pemuda ke jalan yang lurus, pelestarian lingkungan, serta penanggulangan bencana.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani, edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera. Ibid*, hlm. 605.

## **E. Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008**

### **1. Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Menjaring Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Yang Akan Diusungnya**

Ada beberapa tahapan yang dilakukan PKS untuk menjaring tokoh yang akan diusungnya, yaitu:

#### **a. Pemilu Internal PKS (Pemira)**

Setiap akan melaksanakan pemilu, di tubuh PKS sendiri dilaksanakan Pemilu Internal (Pemira) PKS untuk memilih kader yang layak maju dalam pemilu tanpa melibatkan nama-nama dari eksternal PKS. Begitu juga dalam Pilkada Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2008. Dalam Pemira tersebut terpilihlah Ardiansyah, S.Hut sebagai orang yang layak untuk maju dalam Pilkada.<sup>19</sup>

#### **b. Survei oleh Lembaga Independen**

Proses pencalonan Dr. H. M. Safi'i M.Si dan Ardiansyah S. Hut berawal dari adanya survei oleh sebuah Lembaga Independen FISIP Unlam Banjarmasin pada tahun 2006. Survei ini dilakukan untuk menjaring nama yang memperoleh dukungan terbanyak dari

---

<sup>19</sup> Wawancara pribadi penulis dengan Muhammad Afifi Bizri, SHI, SH. M. Hum, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Ketua Tim Sukses Pemenangan pasangan Dr. H. M. Safi'i M.Si.-Ardiansyah, S.Hut. dari PKS di rumah pribadi, Sabtu 28 November 2009.

masyarakat untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dari survei tersebut memunculkan beberapa nama dari pejabat publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Dr. Safi'i M.Si (Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2003-2008), H. Achmad Fikry MAP (Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan), Ardiansyah S.Hut (Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan), Drs. Bahdar Johan (Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan periode 2003-2008), dan beberapa tokoh lainnya.

Selanjutnya PKS melakukan silaturahmi dengan para ulama sebagai data pembanding survei, hasilnya mengerucut ke dua hingga ketiga orang calon Bupati.<sup>20</sup>

Setelah didapatkan beberapa nama yang dinilai layak untuk diusung, selanjutnya pihak Partai Keadilan Sejahtera membentuk tim dengan nama Tim Optimalisasi Musyarakah (TOM). Tim ini bertugas untuk melakukan pendekatan dan komunikasi kepada masing-masing tokoh tersebut dengan cara silaturahmi dan menyertai setiap aktifitas mereka. Menanyakan visi misi mereka dalam membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ada beberapa hal yang dipantau PKS dalam menjalankan pendekatan tersebut, diantaranya bagaimana tokoh tersebut menjalankan aktifitas keagamaannya, dan bagaimana berakhlak dalam kehidupannya sehari-hari.

---

<sup>20</sup> Radar Banjarmasin, *Safi Diminta Lobi Partai Lain*, Sabtu 3 November 2007.

c. Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Dalam penyerapan aspirasi, PKS mendapatkan lamaran dari tokoh masyarakat dan ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meminta PKS untuk memasang dan mendukung Dr. Safii M.Si dengan Ardiansyah S. Hut dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) April 2008.

Proses lamaran tersebut disampaikan langsung oleh KH. Asnawi Syihabuddin, Lc. mewakili ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Wakil Sekretaris Jenderal PKS Pusat Habib Aboe Bakar Al Habsyi ketika bersilaturahmi di kediaman KH. Muhammad Ridwan, Kapuh Kecamatan Simpur pada tanggal 20 Mei 2007. Hadir pula pada saat itu Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Kalimantan Selatan Riswandi SIP dan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Kalimantan Selatan Riyadi SE.<sup>21</sup>

Habib Aboe Bakar Al Habsyi belum memberikan jawaban tentang lamaran tersebut, namun sepenuhnya menyerahkan prosesnya ke DPW PKS Kalimantan Selatan sesuai mekanisme di tubuh PKS.<sup>22</sup>

Untuk memuluskan jalan menuju Bupati dan Wakil Bupati dalam memimpin Kabupaten Hulu Sungai Selatan selajutnya, DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjalin koalisi dengan partai yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan PKS.

---

<sup>21</sup> DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Buletin Gema Keadilan*, Edisi XII/Februari 2008.

<sup>22</sup> Radar Banjarmasin, *Ulama Jodohkan Safi'i-Ardiansyah*, 21 Mei 2007.

Meskipun perolehan suara PKS di Pemilu 2004 melebihi batas persyaratan untuk mengajukan pasangan dalam Pilkada, namun untuk memenangkan Pilkada 2008, PKS menjalin koalisi dengan tiga partai lainnya. Yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),

Bersama tiga partai pendukungnya, PKS mendeklarasikan pasangan DR. H. M Safi'i-Ardiansyah, S.Hut pada tanggal 17 Februari 2008 di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan.

## **2. Sosialisasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang diusung Partai Keadilan Sejahtera.**

Agar pasangan yang diusungnya dikenal seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan selanjutnya memperoleh suara massa yang banyak. PKS Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan sosialisai. Sosialisasi dilakukan oleh seluruh pengurus PKS, mulai dari pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Cabang (DPC) sampai Dewan Pengurus Ranting (DPRa), sampai ke pengurus yang ada di RT di setiap desa. Tim sosialisai antar desa disebut Tim 10, yaitu tim beranggotakan 10 orang dalam satu desa, tugasnya adalah untuk menebarkan isu-isu yang akan diperjuangkan pasangan yang mereka usung dan merekrut sebanyak-banyaknya massa.

Ada dua bentuk sosialisasi yang dilakukan. *Pertama*, tatap muka, seperti pengobatan gratis, pasar murah, pengajian ibu-ibu, shalat hajat,

menghadiri hajatan yang digelar warga dan lain sebagainya. *Kedua*, menyebarkan atribut seperti membagikan kalender, pembagian buletin PKS Gema Keadilan, stiker, pembagian surah Yasin bergambar pasangan, sarung bertuliskan nama pasangan, baju koko, jilbab dan lain sebagainya.

Dalam pencalonan pasangan Dr. H. M. Safi'i M.Si-Ardiansyah, S.Hut. PKS membentuk dua tim sukses, yaitu tim sukses dari internal PKS sendiri yang diketuai oleh Sekretaris DPP PKS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Afif Bizri, SHI, SH. M. Hum. Dan tim sukses gabungan partai pengusung (PKS, PAN, PKB dan PPP) membentuk Tim Pasangan diambil dari eksternal partai, yaitu KH. Asnawi Syihabuddin, Lc.

Dua tim sukses inilah yang bekerja keras memenangkan pasangan, mulai dari pencalonan, kampanye sampai menjelang pemungutan suara.

Dalam masa kampanye pasangan Dr. H. M. Safi'i, M.Si-Ardiansyah, S.Hut mengerahkan sebanyak-banyaknya masa. Salah satunya adalah dengan cara memberikan biaya transportasi untuk mobilitas peserta kampanye.

Seperti kebanyakan kampanye pemilu, PKS juga membagikan atribut-atribut pasangan. Seperti bendera, baliho, stiker, baju kaos, baju koko dan lain sebagainya. PKS berusaha tidak memberikan uang untuk



mendukung pasangannya, namun memberikan yang nilai manfaat lebih banyak, seperti sarung, baju koko dan jilbab.<sup>23</sup>

Selain itu cara-cara tersebut di atas, juga dilakukan program bedah rumah yang dilaksanakan di setiap kecamatan se Kabupaten Hulu Sungai Selatan.<sup>24</sup>

Tim sukses juga melakukan rapat-rapat untuk mengevaluasi kinerja mereka dalam tahapan menarik simpati pemilih. Mengevaluasi kepribadian masing-masing pasangan yang akan mereka menangkan, seperti mengevaluasi kekurangan dari Calon Bupati Dr. H.M. Safii, Msi untuk segera dibenahi. Begitu juga dengan Calon Wakil Bupati Ardiansyah, S.Hut.

### **3. Cara Pemenangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Ada tiga strategi yang digunakan PKS dalam memenangkan pasangan yang diusungnya. PKS Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengibaratkan pertarungan dalam Pilkada dengan sebutan “perang”. *Pertama*, Perang Udara, bersifat menebar “amunisi”, seperti menebar sebanyak-banyaknya atribut-atribut yang sifatnya mendukung pasangan

---

<sup>23</sup> Wawancara pribadi penulis dengan H. Ardiansyah, S.Hut, di ruangan Kantor Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin, 30 November 2009.

<sup>24</sup> Wawancara pribadi penulis dengan KH. Asnawi Syihabuddin, Lc, Ketua Tim Sukses Pemenangan pasangan Dr. H.M.Safii, M.Si-Ardiansyah S.Hut dari eksternal partai di rumah pribadi, Kamis, 03 Desember 2009.

Dr. H.M. Safi'i-Ardiansyah, S.Hut, tanpa harus mematok seberapa banyak akan memperoleh perhatian masyarakat.

*Kedua*, Kavalери, yaitu silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan ulama, mengumpulkan sebanyak-banyaknya masyarakat dengan menggelar pengajian atau tablig akbar dan sholat hajat berjamaah. Tim ini dibagi menjadi dua, yaitu Tim PKS dan Tim Pasangan. Kemudian Tim Pasangan dibagi lagi menjadi dua, yaitu Tim Dr. H. M. Safii M.Si dan Tim Ardiansyah, S.Hut.

Tim Dr. H. M. Safii, M.Si membawahi wilayah Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan, Daha Barat, Simpur, Kalumpang, dan sebagian wilayah Sungai Raya dan Kandangan. Sedangkan Ardiansyah, S.Hut Kecamatan Padang Batung, Angkinang, Padang Batung, Telaga Langsung dan sebagian Sungai Raya dan Kandangan. Tim PKS selain melakukan upaya pemenangan dengan cara mendekati masyarakat dengan kegiatan sosialnya, juga menyertai setiap Tim Pasangan melaksanakan silaturahmi.

*Ketiga*, Infanteri atau Perang Kota, dibentuk tim khusus beranggotakan sekitar 30 orang, kembali melakukan survei ke tengah masyarakat dengan melakukan strategi dan taktik,<sup>25</sup> dan mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah (*Direct Selling*). Stratak yang dilakukan ini adalah untuk melihat dan mendengar secara langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat.

---

<sup>25</sup> Untuk penyebutan "Strategi dan Taktik" selanjutnya penulis menggunakan sebutan "Stratak".

Tim tersebut dibentuk pada 9 Februari 2008, *Direct Selling* dan survei dilakukan selama lima hari sejak 11 Februari sampai 15 Februari 2008 di beberapa tempat di tujuh kecamatan. Yaitu, Baluti, Jambu Hilir, Pandang Panjang, Tibung Raya, Jembatan Merah, Padang Batung, Kalimati, Pulau Nagara, Pulau Sepakat, Pantai Harapan, Pulau Ringgit, Amawang Kiri, Ganda, Budi Bakti, Tabihi, Bilui Lok Kupang, Wasah Hilir, Tanah Bangkang, Lok Binuang, Mandampa dan Sungai Raya Utara.

Desa tersebut merupakan perwakilan dari 7 Kecamatan, yaitu, Kandangan, Simpur, Telaga Langsung, Angkinang, Sungai Raya dan Padang Batung, dengan jumlah responden 2.133 orang atau 82,94% masih mendukung pasangan Dr. H. M. Safii-Ardianyah, S.Hut.<sup>26</sup>

*Direct Selling* merupakan program khas PKS untuk bisa meraih suara sebanyak-banyaknya. *Direct Selling* tersebut dilakukan dengan menanyakan langsung kepada warga masyarakat dari rumah ke rumah siapa yang akan mereka pilih dalam Pilkada mendatang. Kalau pilihannya sudah mengarah ke pasangan Dr. H. M. Safii, S.Msi.-Ardiansyah, S. Hut., maka suara tersebut harus dipertahankan dan lebih diperkuat lagi. Kalaupun belum, masih dilakukan promosi dengan menjual program yang akan diperjuangkan oleh pasangan yang diusung PKS.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Buletin Gema Keadilan*, Edisi XIII/Maret 2008.

<sup>27</sup> Wawancara pribadi penulis dengan Muhammad Afif Bizri, SHI, SH. M. Hum, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Ketua Tim Sukses Pemenangan Pasangan Dr. H. M. Safi'i Msi.-Ardiansyah, S.Hut, dari PKS di rumah pribadi, Sabtu 28 November 2009.

Menjelang pemungutan suara, PKS tetap melakukan strategi dalam penjagaan perolehan suara pasangan (advokasi suara), yaitu dengan menyiapkan saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan juga kecepatan dan ketepatan informasi yang disampaikan kepada Tim Sukses bersama.